

**DAMPAK PANDEMI COVID-19TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Agung Khalimusodo  
NPM : 4315500005**

**Diajukan Kepada:**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2021**



**DAMPAK PANDEMI COVID-19TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BREBES**

**SKRIPSI**

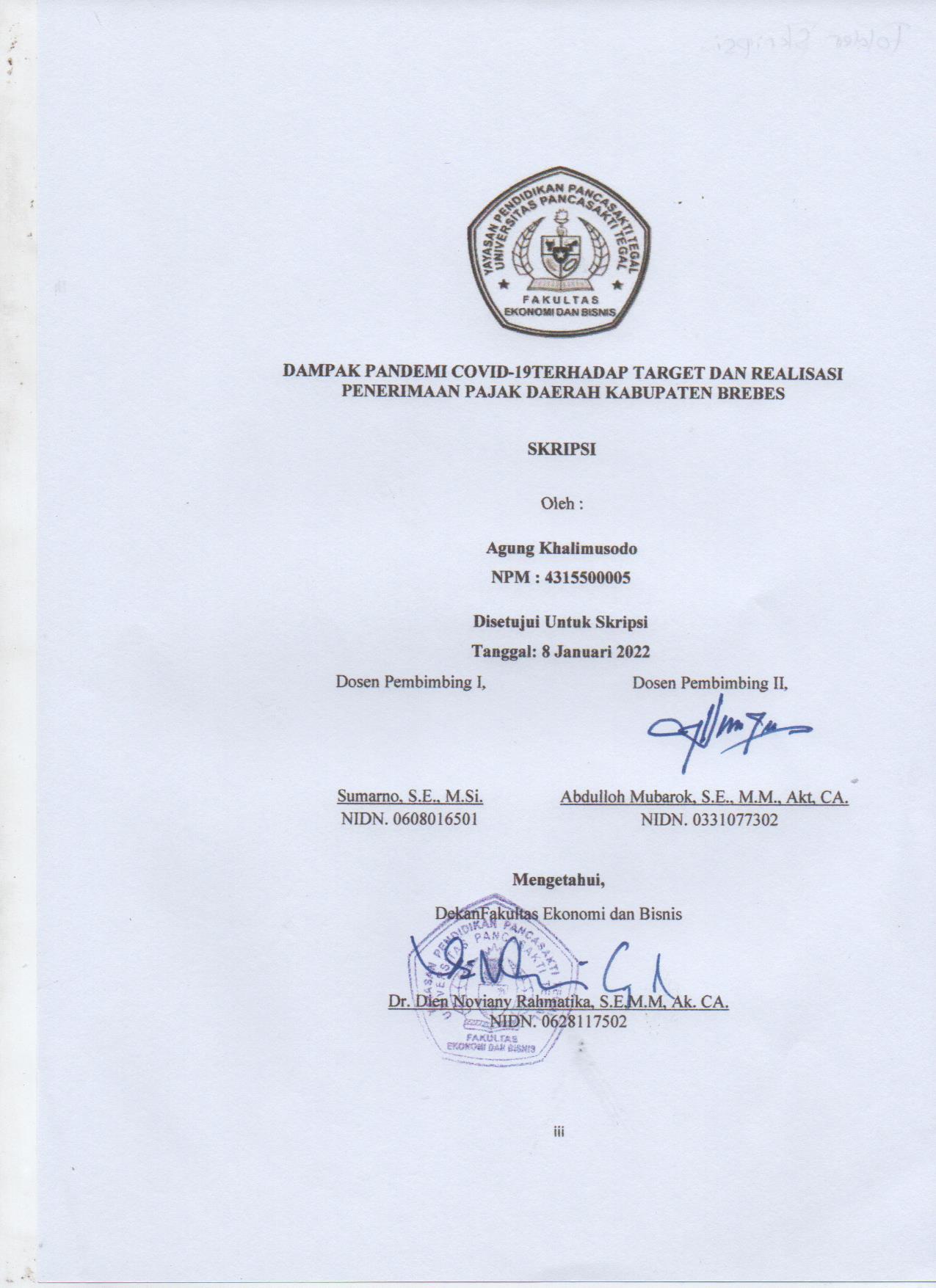
Oleh :  
**Agung Khalimusodo  
NPM : 4315500005**

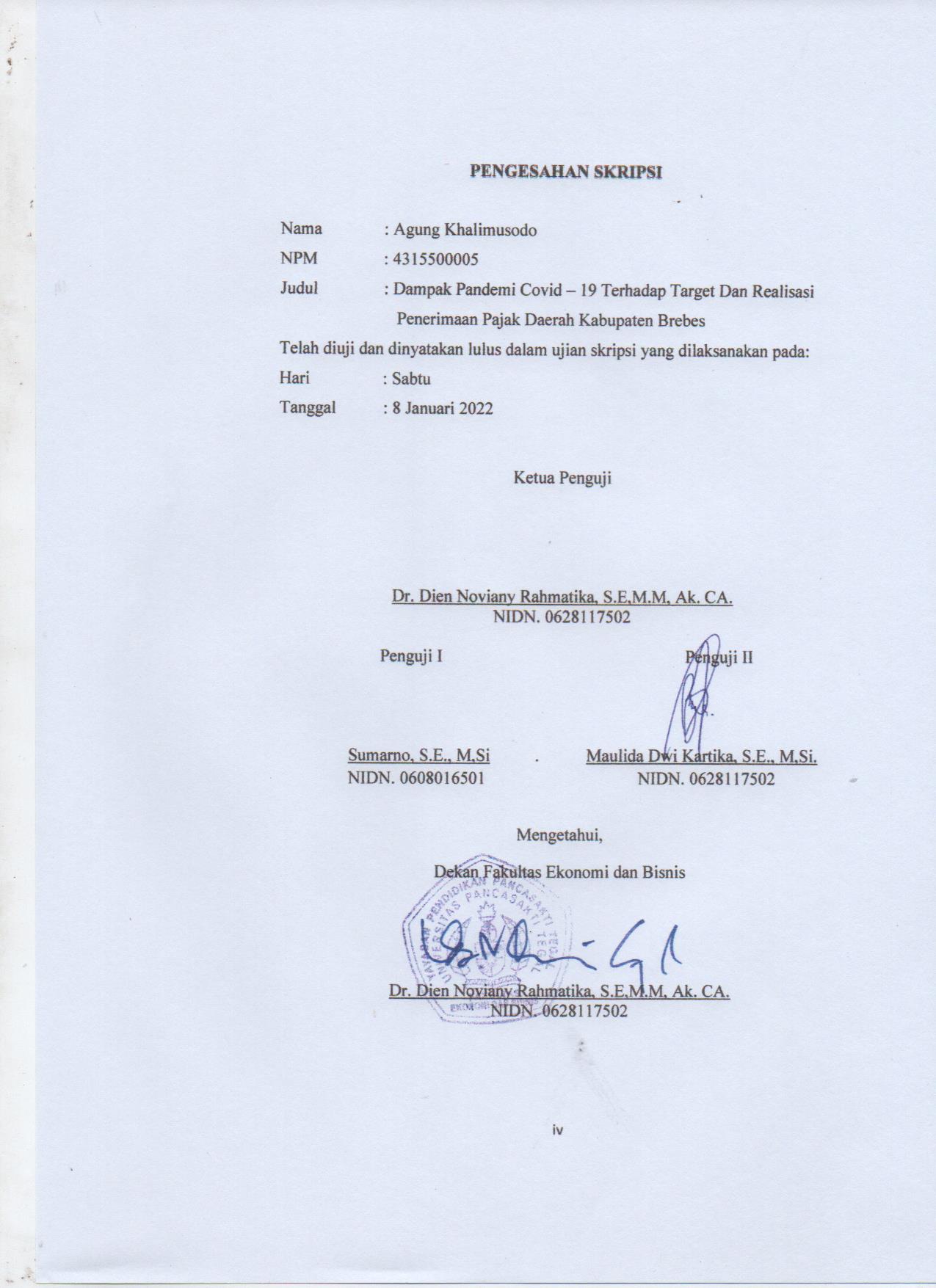
**Diajukan Kepada:**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2021**

****



**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

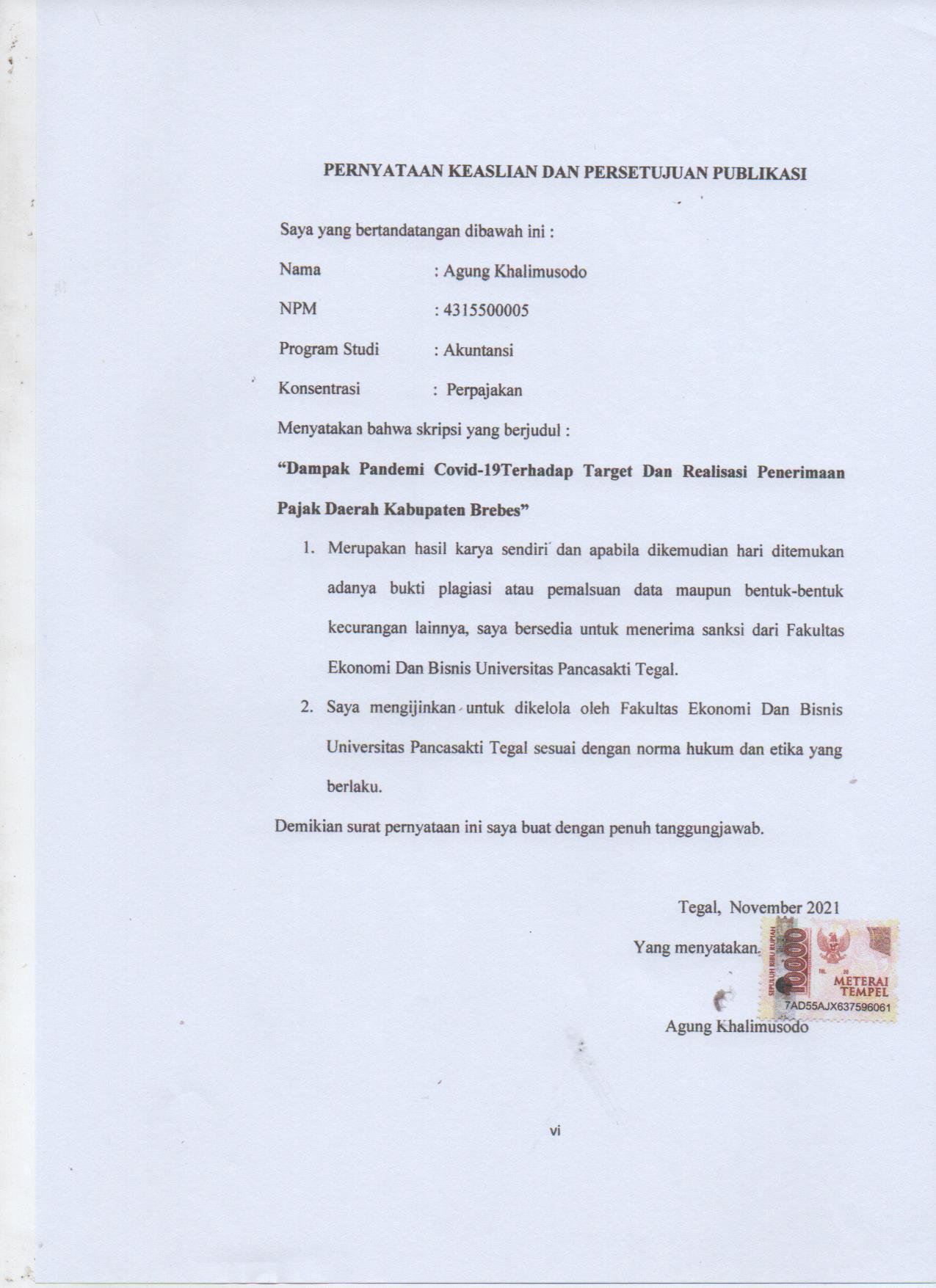
MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki” (Bambang Pamungkas)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtua tercintaku Bapak Karyoto dan Ibu Muniroh yang tanpa henti mendoakan, memberi kasih sayang, serta memberi semangat untuk selalu melakukan yang terbaik.
2. Kakak-kakak ku yang selalu memberikan semangat dan mendukungku.
3. Teman-teman Autism squad Azizpati, Aji pur dan Sri Galang yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dan dukungan.
4. Calon teman hidup yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam segala hal, Wika yulianis, semoga kebaikan selalu menyertai.

****

**ABSTRAK**

**Agung Khalimusodo, 2021.** Penelitian Ini Bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Brebes. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 11 jenis pajak.Objek penelitian pada penelitian ini yaitu di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) terjadi penurunan target penerimaan pajak daerah kabupaten brebes pada tahun 2020 sebesar 4,86%. 2) terjadi penurunan sebagian besar realisasi pajak dari objek pajak yang ada di Kabupaten Brebes sehingga menyebabkan total realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2020 menurun sebesar 3,61%.

**Kata kunci**: Dampak Pandemi, Target Pajak, Realisasi Pajak

***ABSTRACT***

Agung Khalimusodo, 2021. *This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the target and realization of local tax revenue in Brebes Regency. The sample in this study consisted of 11 types of taxes. The object of research in this study is the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Brebes Regency. The data used in this study consisted of primary data and secondary data.*

*The results of this study indicate that 1) there is a decrease in the target of Brebes district tax revenue in 2020 by 4.86%. 2) there was a decrease in most of the tax realization from tax objects in Brebes Regency, causing the total realization of Brebes Regency regional tax revenue in 2020 to decrease by 3.61%.*

**Keywords***: Pandemic Impact, Tax Target, Tax Realization*

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirrabil’alamin. Terucap syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang telah memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul ***“***DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BREBES***”.*** Proposal skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Abdulloh Mubarok, S.E, M.M, Akt, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
3. Bapak Sumarno,SE, M.Si., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran, bantuan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
4. Bapak Abdulloh Mubarok, S.E, M.M, Akt, CA.,selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran, bantuan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
5. Serta teman – teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi angkatan tahun 2015 yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberikanarahan maupun saran kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, September 2021

Agung Khalimusodo  
NPM . 4315500005

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL…………………………………..…………………...……..**i

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………..Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721093)

[HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………..Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721094)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………………………………Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721095)

[PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI………….Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721096)

[ABSTRAK……………………………………………………………………....Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721097)i

[KATA PENGANTAR………………………………………………………….Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721098)

[DAFTAR ISI……………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.](#_Toc87721099)

[DAFTAR TABEL……………………………………………………………...1](#_Toc87721100)

**BABI PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang ..…………………………………………………………. 1
2. Perumusan Masalah ………………………………………………………4
3. Tujuan Penelitian ………………………………………………………….5
4. Manfaat Penelitian ………………………………………………………...5

**BAB IITINJAUAN PUSTAKA**

1. Pajak Daerah ………………………………………...……………………7
2. PERDA Pajak Daerah ………………………………..………………….16
3. Sumber Penerimaan Kab. Brebes……………………...…………………32
4. Potensi Wilayah Kabupaten. Brebes….………………………………….35
5. Corona Virus……………………………………………………………..39
6. Kajian Penelitian Sebelumnya…. ……………………………………….54
7. Kerangka Pemikiran …………..…………………………………………57
8. Perumusan Hipotesis …………………………………………………….63

**BAB 3 METODE PENELITIAN**

1. Objek Penelitian …………………………………………………………64
2. Variabel Penelitian……………..………………….………….………….63
3. Jenis Data …………………………………………..……………………64
4. Teknik Pengumpulan Data……..………………………..……………….65
5. Teknik Analisis Data…………...……………………………….………..65

[BAB IV](#_Toc87721134)HASIL DAN PEMBAHASAN

[A.Gambaran Umum Obyek penelitian **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc87721136)

[B.Hasil Penelitian…….………………………………………………………………………………...……….. 74](#_Toc87721137)

[1. Comperatif analisis 76](#_Toc87721138)

[2. Uji Rata-Rata dengan Uji Paired sample T test 78](#_Toc87721139)

[3. Uji Normalitas 79](#_Toc87721140)

[4. Wilcoxon Signed Rank Test 80](#_Toc87721141)

[C.Pembahasan ….. 88](#_Toc87721143)

[BAB V](#_Toc87721144)[KESIMPULAN](#_Toc87721145) DAN SARAN

1. [Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………….…….97](#_Toc87721146)
2. [Saran](#_Toc87721147)  ...98

[DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...99](#_Toc87721148)

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

[Tabel 2.1](#_Toc87730917)[Penelitian Terdahulu 55](#_Toc87730918)

[Tabel 4.1](#_Toc87730944)[Diagram 68](#_Toc87730945)

[Tabel 4.2](#_Toc87730946)[Hasil Sensus Penduduk BPS Kab.Brebes 68](#_Toc87730947)

[Tabel 4.3](#_Toc87730949)[Data Target Dan Realisasi Pajak Daerah 74](#_Toc87730950)

[Tabel 4.4](#_Toc87730951)[Perbandingan Target Penerimaan Pajak 76](#_Toc87730952)

[Tabel 4.5](#_Toc87730953)[Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak 77](#_Toc87730954)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Jumlah negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia khususnya di Asia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan telah meneliti tentang perlemahan ekonomi dunia.Menurut JP Morgan ekonomi dunia diprekdiksi akan menurun mecapai -1,1% di Tahun 2020. Sedangkan menurut EIU ekonomi dunia diprediksi mencapai -2,2%, Sementara menurut Fitch ekonomi dunia diprediksi akan mencapai -1,9%,menurut EIU memprediksi minus 2,2%, dan menurut International Monetary Fun (IMF) ekonomi dunia akan mengalami devisit -3%. (*Iskandar, 2020: 2)*

Dampak Pandemi Covid-19 atau penyebaran virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi khusunya di sektor pariwisata dan manufaktur. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo.

Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 31 Januari 2021 bahwa ada 1.078.314 pasien positif, 873.221 pasien sembuh, dan sebanyak 29.998 yang meninggal

dunia (KOMPAS.TV). Semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat atau yang disebut dengan istilah *social distancing* hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang dimulai pada Kota Jakarta pada tanggal 10 April 2020. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri.Tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu.Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Mengacu pada dampak buruk dari Covid-19 ini(Silalahi, 2020 :1)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun 2021. Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik(tirto.id, 2020).

Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar.Mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN.Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar perananannya dalam menanggulangi dampak Covid-19(Hanoatubun,2020)

Begitupun berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan dampak corona yang diteliti oleh **Silpa Hanoatubun (2020),** Jeni Susyanti (2020), Syamsuddin (2021) yang menyebutkan berbagai masalah yang ditimbulkan akibat pandemi corona pada pendapatan negara.

Dalam penelitiannya hanotubun (2020) menyampaikan berbagai dampak pandemi yang menjadi sebab menurunnya pendapatan masyarakat seperti meningkatnya PHK, sulitnya kegiatan ekonomi karena adanya pembatasan – pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mengurangi pendapatan dan akhirnya kesulitan untuk membayar pajak.

Sedangkan dalam penelitiannya Susyanti (2020) menyampaikan persoalan - persoalan yang mempengaruhi pendapatan pemerintah dalam masa pandemi yang disebabkan karena sikap dan karakter kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akibat tekanan keadaan yang ditimbulkan adanya pandemi corona.

Kabupaten Brebes yang memiliki banyak sumber-sumber pajak daerah tentunya diharapkan penerimaan pajak daerah dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Brebes. Pengelolaan itu baik jika aturan, kebijakan, perencanaan danpelaksanaannya baik. Dalam UU No. 28 tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak daerah kabupaten Brebes.

Perencanaan target pajak diperlukan sebagai tolak ukur target dan realisasi yang diharapkan . Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target pajak yang ingin dicapai.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia.Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (phisical distancing) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Brebes. Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes..

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

* + - 1. Apakah pandemi covid-19 berdampak terhadaptarget penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes?
      2. Apakah pandemi covid-19 berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap target penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes
2. Mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap realisasi penerimaan daerah kabupaten Brebes?
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat teoritis**
2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan juga informasi mengenai dampak Corona virus terhadap targetdan realisasi pajak daerah kabupaten Brebes.

1. Bagi pihak lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi semua fihak dalam mendapatkan referensi dan menambah pustaka khususnya yang ada di fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal.

1. **Manfaat Praktis**
2. Bagi Penulis
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
4. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
5. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan guna menanggualangi dampak dari pandemi covid-19terhadaptarget dan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupateb Brebes.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Pajak Daerah**

**a. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah**

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

Pengertian Pajak Daerah Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007) menyatakan bahwa: “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak Daerah Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), penerimaan(budgetory), redistribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetory dan fungsi regulatory. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

1. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah.

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang di dalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhankewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.

* 1. **Jenis – jenis Pajak Daerah**

# Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Pajak Daerah** | **Objek Pajak Daerah** | **Subjek Pajak Daerah** |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor  *(oficial assesment)* | Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor | Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor *(oficial assesment)* | Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor | Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor *(oficial assesment)* | Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air | Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
| 4 | Pajak Rokok  *(oficial assesment)* | Konsumsi Rokok | Konsumen Rokok |
| 5 | Pajak Air Permukaan  *(Self Assesment)* | Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan | Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan |
| 6 | Pajak Hotel  *(Self Assesment)* | Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan | Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel |
| 7 | Pajak Restoran  *(Self Assesment)* | Pelayanan yang disediakan oleh Restoran | Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran |
| 8 | Pajak Hiburan  *(Self Assesment)* | Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran | Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan |
| 9 | Pajak Reklame  *(Self Assesment)* | Semua penyelenggaraan Reklame | Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame |
| 10 | Pajak Penerangan Jalan  *(oficial assesment)* | Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendirimaupun yang diperoleh dari sumber lain. | Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik |
| 11 | Pajak Parkir  *(Self Assesment)* | Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. | Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor |
| 12 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan *(Self Assesment)* | Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. | Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| 13 | Pajak Air Tanah  *(Self Assesment)* | Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah | Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah |
| 14 | Pajak Sarang Burung Walet  *(Self Assesment)* | Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet | Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet |
| 15 | PBB Perdesaan & Perkotaan  *(oficial assesment)* | Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakanuntuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan | Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan. |
| 16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan *(oficial assesment)* | Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |

Terdapat beberapa permasalahan ketika merancang sistem pajak yang adil, khususnya di negara berkembang, karena:

* 1. tingkat rata-rata pajak rendah di mana penghasilan dan jumlah orang kaya relatif kecil, berarti tidak ada alternatif lain kecuali mengenakan pajak pada masyarakat miskin;
  2. kurangnya data yang akurat berkaitan dengan dasar pengenaanpajak;
  3. ketidak-akuratan penilaian ditambah dengan penyelundupan (*evation)* pajak yang dilakukan oleh orang kaya, menyebabkan apapun bentuk dan sistem pajakcenderung akan memberikan beban lebih berat pada masyarakatmiskin;
  4. dorongan atas pengaruh negatif dari pajak progresif berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
  5. **Prinsip-Prinsip Pajak**

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

* + - 1. Prinsip keadilan (Equity).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

* + - 1. Prinsip Kepastian (Certainty).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3) Prinsip Kemudahan (Convenience).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (Efficiency).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil - kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

* + - 1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
      2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
      3. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay)

# d. Penilaian/Penetapan Pajak

Tidak ada pajak yang sempurna. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk merancang serangkaian pajak yang dapat meminimalisasi pelanggaran atas kriteria-kriteria pajak diatas. Perlu diingat bahwa kemungkinan konflik di antara kriteria-kriteria tersebut dapat terjadi, misalnya:

* 1. Antara keadilan danefisiensi
  2. Antara kemudahan administrasi dankeadilan
  3. Antara hasil dan ekonomi efisiensi, danlainnya

Namun demikian, kehati-hatian dalam merancang instrumen pajak dapat memperbaiki *trade-off* di antara kriteria tersebut.

1. **PERDA Pajak Daerah di Kabupaten Brebes**

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) dari pusat. Dalam banyak hal, Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru daerah diberi peluang untuk mengenakan pungutan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat perluasan basis Pajak Daerah. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Diharapkan pengenaan Pajak Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Kemudian Daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Pajak daerah diatur dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya pajak daerah kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Brebes Nomor8 Tahun 2010. Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun pengertian pajak daerah Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

* + - 1. **Pajak Hotel**

Menurut PERDA No.8 Tahun 2010 bagian kedua Pasal 3 berbunyi :

(1) Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telephon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Merujuk pada UU RI Nomor 28 Tahun 2009, Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

* + - 1. **Pajak Restoran**

Menurut PERDA Kabupaten Brebes No.8 Tahun 2010 bagian 3

Pasal 8 bahwa Pajak Restoran, adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di Restoran.Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 200.000,- per hari.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, sedangkan tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

* + - 1. **Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.Jenis pajak hiburan diantaranyaadalah :

* + - * 1. Tontonan film;
        2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
        3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
        4. Pameran;
        5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
        6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
        7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
        8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
        9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
        10. Pertandingan Olah Raga termasuk lomba olah raga di air dan sejenisnya.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan,sedangkanWajib Pajak Hiburan adalah orang

pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

Untuk jenis pertunjukan dan atau keramaian yang menggunakan sarana film dalam gedung sebesar 25% dan di luar gedung 15%.

Untuk pertunjukan kesenian rakyat / tari tradisional sebesar 10%.

Untuk Hiburan berupa : 1) pagelaran busana sebesar 30% 2) kontes kecantikan sebesar 30%

diskotik sebesar 75%

karaoke sebesar 75%

klab malam sebesar 75%

permainan ketangkasan sebesar 30%

panti pijat sebesar 30%.

mandi uap/spa sebesar 30%.

Untuk pertunjukan musik, pameran dan atau tontonan modern sebesar 25%.

Untuk permainan bilyard sebesar 25%.

Untuk permainan Bolling dan Golf sebesar 30%

Untuk permainan ketangkasan anak-anak sebesar 15%.

Untuk permainan Ketangkasan sebesar 30%.

Untuk pertandingan olah raga, fitnes dan binaraga sebesar 20%.

Untuk sirkus acrobat dan sulap sebesar 20%.

Untuk pacuan kuda dan balap kuda, kendaraan bermotor, karapan sapi dan sejenisnya sebesar 25%.

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak .Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan. dan masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan. *(PERDA Kab.BrebesNo. 8 Tahun 2010)*

* + - 1. **Pajak Reklame**

Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame meliputi:

* + - * 1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan baliho;
        2. Reklame kain;
        3. Reklame melekat, stiker;
        4. Reklame selebaran;
        5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
        6. Reklame udara;
        7. Reklame apung;
        8. Reklame suara;
        9. Reklame film/slide;
        10. Reklame peragaan;

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut dan apabila Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.Jika Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.jika Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu. jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. *(PERDA Kab.BrebesNo. 8 Tahun 2010)*

* + - 1. **Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri. Penerangan Jalan yang tidakkena pajak meliputi :

* + - * 1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
        2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
        3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.Sedangkan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

* + - * 1. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan :

bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen );

Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkansebesar 3% (tiga persen).

* + - * 1. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen)

1. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan. Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan dan memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis** | **No** | **Jenis** |
| 1 | Asbes | 20 | Granit / andesit. |
| 2 | Batu tulis; | 21 | Gips; |
| 3 | Batu setengah permata; | 22 | Kalsit; |
| 4 | Batu Kapur; | 23 | Kaolin ; |
| 5 | Batu apung; | 24 | Leusit ; |
| 6 | Batu permata; | 25 | Magnesit; |
| 7 | Bentonit; | 26 | Mika; |
| 8 | Dolomit; | 26 | Marmer; |
| 9 | Feldspar; | 28 | Nitrat; |
| 10 | Garam batu (halite); | 29 | Opsidien; |
| 11 | Grafit ; | 30 | Oker; |
| 12 | Yarosif; | 31 | Zeolit; |
| 13 | Trakkit; | 32 | Basal; |
| 14 | Talk; | 33 | Tanah liat; |
| 15 | Tanah serap (fullers earth); | 34 | Tawas (alum); |
| 16 | Tanah diatome; | 35 | Tras; |
| 17 | Phospat; | 36 | Pasir clan kerikil |
| 18 | Perlit; | 37 | Pasir clan kerikil; |
| 19 | Pasir Kuarsa; | 38 | Minerallain sesuai undang -undang |

1. **Pajak Parkir**

Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek

Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir / Penitipan.Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

1. **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

* 1. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan dan
  2. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk pendidikan dasar dan menengah

1. **Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.Tidak termasuk objek adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Subjek pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahaan Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Waletdihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

* 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  2. Jalan tol;
  3. Kolam renang;
  4. Pagar mewah;
  5. Tempat olahraga;
  6. Galangan kapal, dermaga;
  7. Taman mewah;
  8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
  9. Menara.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

1. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi pemindahan hak karena :

* + - 1. Jualbeli;
      2. Tukar menukar;
      3. Hibah;
      4. Hibah wasiat;
      5. Waris;
      6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
      7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
      8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
      9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
      10. Penggabungan usaha;
      11. Peleburan usaha;
      12. Pemekaran usaha;

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

1. **Sumber Penerimaan Kabupaten Brebes**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah(*Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004)*

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan (UU No 33 Tahun 2004).

Pajak daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor,PajakKendaraan di atas Air, Pajak Balik Nama, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan Air Tanah, Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak lain-lain. Pajak-pajak daerah ini diatur oleh UUno. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Retribusi Daerah, antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Biaya Cetak Kartu, Retribusi Pemakaman, Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Retribusi Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemadam Kebakaran, dan lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil deviden BUMD, dan 4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah*(Soleh dan Rochmansjah (2010)*

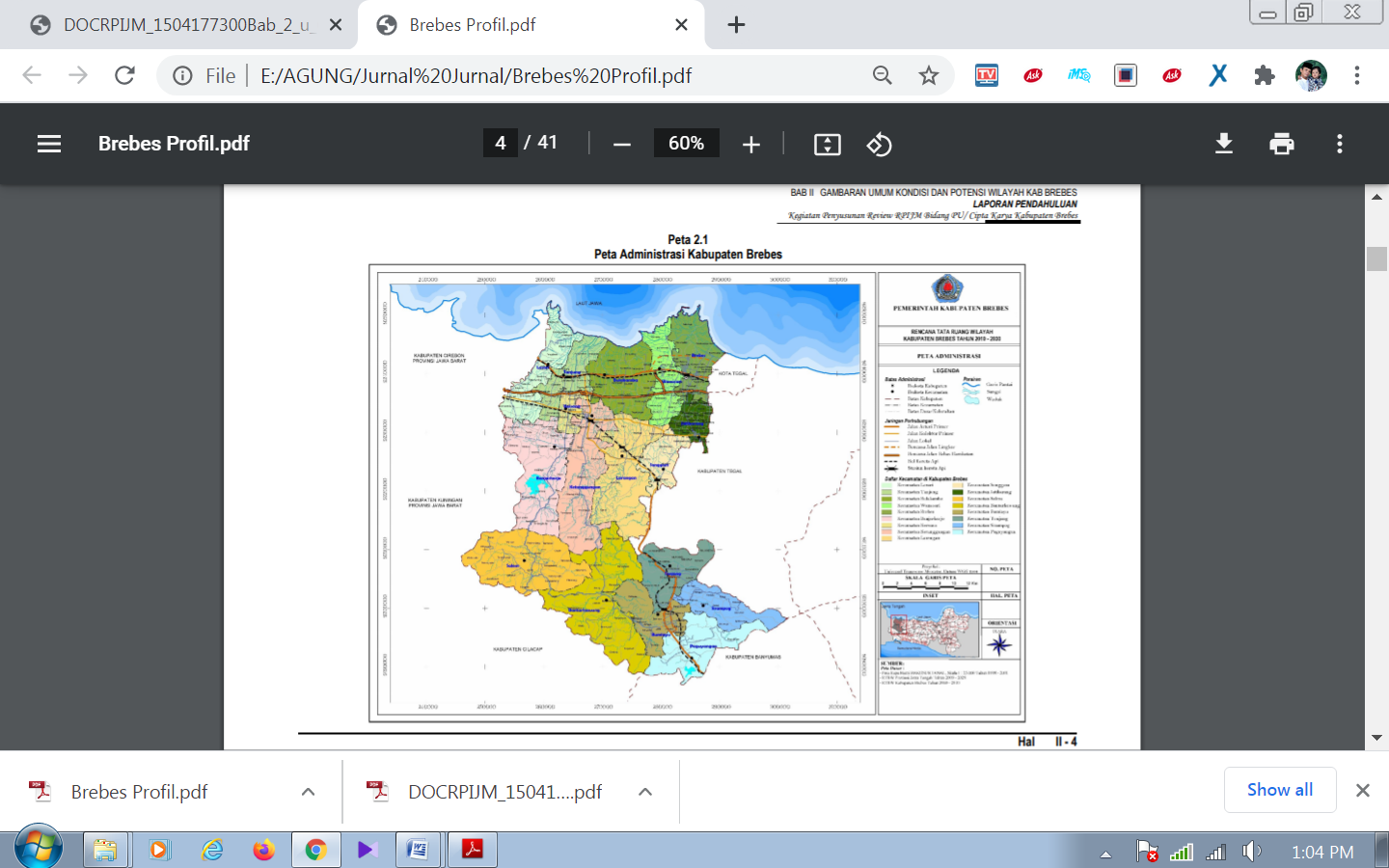
* + - * 1. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi(Prakosa (2007). Dana perimbangan terdiri atas(Soleh dan Rochmansjah : 2010)

1. Dana Bagi Hasil terbagi atas Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi HasilBukan Pajak (BHBP) atau yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam. BHP antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan Badan maupun pribadi, sedangkan BHBP antara lain : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, penambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi(Soleh dan Rochmansjah : 2010)
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan berdasarkan “celah fiskal” yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal ditambah alokasi dasar.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk kegiatan khusus, misalnya reboisasi, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, dan bencana alam(Soleh dan Rochmansjah : 2010)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah selain dari PAD dan dana perimbangan, juga didapatkan dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan tersebut menunjukkan bagi hasil provinsi yang meningkat selama lima tahun terakhir. Sedangkan dana transfer pusat tidak dapat diprediksikan(Soleh dan Rochmansjah : 2010)

1. ****Potensi Wilayah Kabupaten Brebes**

Dalam pengembangan potensi kegiatan atau komoditas unggulan pasti terdapat beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan dan diperlukan pengelolaan dan pengembangan untuk mempertahan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Brebes. Seperti yang kita ketahui sektor-sektor yang menjadi unggulan di kabupaten Brebes adalah pertanian, peternakan danindustri (*BPS Kabupaten Brebes,2015)*

Pertanian

Padi sawah dan bawang merah merupakan potensi dari sektor pertanian yang terdapat di Kabupaten Brebe ,seperti yang diketahui juga masyarakat di Kabupaten Brebes bekerja sebagai petani. Hasil pertanian padi sawah yang memiliki luas 97.841Ha dan dengan hasil produksi 561.612 ton, selanjutnya adalah hasil pertanian bawang merah yang merupakan jenis pertanian yang juga banyak terdapat di Kabupaten Brebes dengan luas 30.954 Ha dan hasil produksi sebesar3.759.742 ton.

Dari hasil pengamatan kami pengelolaan hasil panendi setiap wilayah sudah dilakukan dengan cukup baik, masyarakat di Kabupaten Brebes yang mayoritas bekerja sebagai petani mengolah hasil panennya lalu kemudian menjualnya kepasar-pasar yang ada di wilayah tersebut atau bahkan menjualnya sampai keluar daerah yang bersangkutan, tergantung seberapa banyak hasil panen yang telah diperoleh. Hasil panen tersebut biasanya tidak dijual secara keseluruhan, melainkan masyarakat juga mengambil sebagian dari hasil panen mereka untuk dikonsumsi sehari - hari.

Dengan adanya lahan pertanian yang sangat luas di Kabupaten Brebes hal ini juga sangat membantu dalam menambah nilai-nilai ekonomi dan pendapatan untuk daerah. Dan juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang masih belum mempunyai pekerjaan. Pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Brebes harus selalu diperhatikan karena sektor pertanian ini merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan di daerah Kabupaten Brebes.

Dalam hal pengembangan sektor pertanian ini juga diperlukan peranan pemerintah dalam upayanya membantu menjaga kualitas tanah serta hasil panennya. Walaupun demikian perananya dari masyarakat juga sangat penting karena hal itu sangat bergantung pada kinerja–kinerja para petani tersebut (*BPS Kabupaten Brebes,2015)*

Peternakan

Itik merupakan hawan ternak yang lebih banyak dikenal di Kabupaten Brebes karena telur yang dihasilkan oleh itik tersebut. Kenyataan ini tidak sesuai dengan data yang kami peroleh dari data yang kami peroleh hewan ternak yang lebih banyak produksinya adalah ayam ras pedaging yaitu terdapat 6.951.000 ekor, sedangkan itik hanyak sejumlah 519.858 ekor, namun hal ini tidak menjadi masalah. Hewan ternak yang terdapat di Kabupaten Brebes yang paling sering dijumpai di Kabupaten Brebes adalah itik.

Dalam pengembangan potensi peternakan ini diperlukan pengawasan pemerintah karena walau bagaimanapun itik juga merupakan hewan unggas yang mudah terserang penyakit. Jika hal itu terjadi itu sangatlah merugikan bagi pendapatan daerah, karena selain menyebabkan kerugian terhadap perkembangbiakannya, hal itu juga akan mempengaruhi keberadaannya telor asin yang merupakan makanan khas yang terdapat di Kabupaten Brebes. Hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran dari para peternak itu sendiri untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan ternaknya agar tidak merugikan bagi pemilik dan juga pemasukan terhadap daerah (*BPS Kabupaten Brebes,2015)*

* + - * 1. Industri

Seperti yang kita ketahui banyak terdapat industri-industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Brebes yaitu salah satunya yang paling terkenal adalah industri yang memproduksi telur asin yang merupakan makanan khas dari Kabupaten Brebes itu sendiri baik yang merupakan industri besar atau pun hanya industri rumah tangga.

Ada juga yang industri yang memproduksi bawang merah. Selain itu masih banyak industri yang terdapat di Kabupaten Brebes yaitu seperti batik salem, pengolahan rajungan, tahu dan pindang bandeng. Pembangunan di sektor industri ini

Merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan sektor lainnya.

Perlunya pengembangan dalam sektor ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan/komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Brebes agar hasil produksi dari industri–industri ini dapat dipasarkan bukan hanya di daerah yang bersangkutan melainkan dapat dipasarkan ke daerah–daerah lain atau bahkan dapat diekspor keluar negeri. Karena tidak menutup kemungkinan, dengan sumberdaya alam yang memadai dan dengan mempertahankan popularitas akan kualitas yang dihasilkan oleh industri–industri yang ada di Kabupaten Brebes semua itu akan terwujud. (*BPS Kabupaten Brebes,2015)*

1. **Virus Corona**
2. **Definisi Virus Corona (Covid-19)**

Corona merupakan bentuk virus yang masih bersaudara dengan penyebab SARS dan MERS ini persis mahkota. Bentuk mahkota di tandai protein S berupa sepatu yang tersebar di sekeliling permukaan virus.

*Dikutip dari situs LIPI*, [virus Corona](https://www.detik.com/tag/virus-corona) memiliki satu rantai RNA sehingga kerap disebut virus RNA.Virus jenis ini bermutasi lebih cepat dibanding DNA hinggasatujuta kali.Virus Corona Paramyxovirus sempat muncul dalam mesin pencarian Google.Keduanya adalah virus yang berbeda meski sama-sama bisa menginfeksi manusia dari hewan. Penyakit yang disebabkan Paramyxovirus adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV), *Newcastle disease*, dan *parainfluenza*.

Definisi virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis.Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri (MERS-CoV : 2020).Dalam sel inang, virus merupakan parasit obligat dan di luar inangnya menjadi tak berdaya.Biasanya virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat (DNAatau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya) yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Genom virus menyandi baik protein yang digunakan untuk memuat bahan genetik maupun protein yang dibutuhkan dalam  daur hidupnya(Farhan Yudi S : 2020)

Adapun istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel-sel eukariota (organisme multisel dan banyak jenis organisme sel tunggal), sementara istilah bakteriofag atau fag digunakan untuk jenis yang menyerang jenis-jenis sel prokariota (bakteri dan organisme lain yang tidak berinti sel.

Yang dimaksud Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah,seperti [*Middle East Respiratory Syndrome*](https://hellosehat.com/kesehatan/penyakit/penyakit-mers-cov/) (MERS-CoV) dan [*Severe Acute Respiratory Syndrome*](https://hellosehat.com/kesehatan/penyakit/sars/) (SARS-CoV). Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya.Coronavirus adalah virus zoonosis, artinya virus ini disebarkan melalui hewan dan manusia(Farhan Yudi S : 2020)

Hasil penyelidikandari [WHO](https://www.who.int/health-topics/coronavirus), investigasi menunjukkan bahwa virus corona penyebab SARS (SARS-CoV) ditularkan dari musang ke manusia. Sementara itu, hewan yang menularkan coronavirus penyebab MERS (MERS-CoV) ke manusia adalah unta dromedaris. Terdapat pula beberapa virus lain yang terdapat pada hewan, tapi belum menginfeksi manusia(Farhan Yudi S : 2020)

Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 di hidung pasien yang terkena flu biasa (*common cold*). Dua coronavirus pada manusia, yaitu OC43 dan 229E, adalah yang bertanggung jawab atas terjadinya sebagian flu biasa. Virus ini diberi nama berdasarkan proyeksi mirip mahkota di permukaannya. “Corona” dalam bahasa Latin berarti “halo” atau “mahkota”. Penyebaran coronavirus adalah sama seperti virus yang penyebab flu lainnya, seperti dari batuk dan bersin, atau dari sentuhan orang yang terinfeksi.  Hampir semua orang pernah terinfeksi virus corona setidaknya sekali seumur hidupnya, biasanya terjadi pada anak-anak. Coronavirus adalah virus yang umumnya muncul pada musim gugur dan dingin di Amerika Serikat. Namun, semua orang bisa terkena virus ini kapan pun(Farhan Yudi S : 2020)

Coronavirus adalah virus yang memiliki banyak jenis. Namanya biasanya dibedakan berdasarkan tingkat keparahan penyakit yang disebabkan dan seberapa jauh penyebarannya. Saat ini ada enam jenis virus corona yang menginfeksi manusia, yakni:229E, NL63, 0C43, HKU1([*Medical News Today*](https://www.medicalnewstoday.com/articles/256521.php#types)). Jenis coronavirus yang lebih langka adalah MERS-CoV yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan SARS-CoV, yang menyebabkan Severe Acute Respiratory syndrome (SARS)(WHO : 2020)

Selain enam jenis coronavirus di atas, pada 7 Januari 2020, sebagaimana dilansir dari laman badan kesehatan dunia, [WHO](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), pemerintah Tiongkok mengonfirmasi jenis virus corona baru yang mewabah pada akhir Desember. Virus corona baru tersebut merupakan jenis yang tidak mirip dengan kelompok virus corona lainnya. Pada awalnya, virus ini dinamakan dengan novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) sampai akhirnya ditetapkan nama resmi yaitu SARS-CoV-2, penyebab penyakit Covid-19. SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dicurigai menular dari hewan kelelawar dan ular ke manusia. Meski begitu, virus ini juga telah dikonfirmasi menular dari manusia ke manusia(WHO : 2020)

1. **Awal mula Kemunculan Virus Corona**

Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih bergantidengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antarpenduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini(Farhan Yudi S : 2020)

Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya.Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena Covid-19(Farhan Yudi S : 2020)

Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya Covid-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia(Farhan Yudi S : 2020)

Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan(WHO : 2020)

Seiring waktu, penelusuran menyebutkan, kasus Covid-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi Covid-19, 26 Februari 2020, kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada badan kesehatan global tersebut(WHO : 2020)

Adapun sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter China dari Rumah Sakit Jin Yin-tan di Wuhan, yang merawat beberapa pasien yang paling awal, menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui pada 1 Desember 2019. Informasi awal mula munculnya Covid-19 masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil itu menunjukkan virus menyerupai sindrom penapasan akut parah (severe acute respiratory syndrome/SARS) ( The lancet Journal : 2020)

1. **Perkembangan Virus Corona**

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 31 Januari2021 bahwa ada 1.078.314 pasien positif, 873.221 pasien sembuh, dan sebanyak 29.998 yang meninggal dunia (Kompas :2020)

Seiring meningkatnya jumlah kasus infeksi virus corona, pemerintah pusat maupun daerah pun sudah mengeluarkan himbauan dan kebijakan guna mencegah meluasnya penyebaran virus ini. Sekolah-sekolah di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Tengah, diliburkan. Begitu juga perkantoran yang sebagian sudah menjalani program bekerja dari rumah( Kompas : 2020).

1. **Dampak Corona**
   1. **Bidang Ekonomi**

Bidang ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-sehari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minun, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk megatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupak faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan Nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan Nasional (Hanoatubun, 2020).

Perekonomian di Asia Pasifik akan mengalami penurunan yang akan lama dikarenakan penyebaran pandemic ini semakin luas menyebar diberbagai dunia. Negara yang terancam dalam jurang resesi akibat pandemic ini antara lain Negara Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi di China diprediksi mengalami penurunan menjadi 4,8%, yang mulanya 5,7%. Negara sector pariwisata seperti Hongkong, Singapura, Thailand dan Vietnam merupakan Negara penyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tentunya akan mengalami dampak perekonomian akibat pandemic ini (Burhanuddin & Abdi : 2020)

Dampak perekonomian yang ditimbulkan dari pandemic ini telah terjadi di beberapa Negara secara signifikan. Selain China, Negara Korea Selatan juga akan mengalami Negara yang terdampak terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Negara Gingseng, yang semulanya diproyeksikan akan tumbuh pada kuartal I dengan angka 2,1% akan mengalami penurunan sekitar 0,4 poin dari persentase. Pertumbuhan ekonomi Negara Thailand dan Taiwan juga di perkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi terendah dalam hampir setengah dekade yang mencapai angka 0,2% dan 1,3% pada kuartal saat ini. Sedangkan Direktur Bank Dunia memprediksikan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melemah dibawah 5% pada kuartal I-2020.

Pada tahun 2020 covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemic ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkat kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemik covid-19, degan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang indutri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama (Misno et al, 2020).*Social* atau *physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (FR.Yamali, 2020).

Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, antara lain :

* 1. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu ≥ 1,5 juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
  2. Terjadinya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020.
  3. Terjadinya punurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
  4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *year-on-year(yoy)* yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.
  5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sector tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020.
  6. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata (Hanoatubun, 2020).

Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak covid terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahan dengan persentase 77% sector formal dan 23% dari sector informal (Kemnaker, 2020).

Jika pandemic ini berlangsung lama, kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah. Akibat hal tersebut, banyak aspek-aspek lain yang terkena, antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyrakat yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim ditengah masyarakat serta pada saat yang sama juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan deficit perdagangan. (Kurniawansyah et al, 2020).

Dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia (*World Bank*, 2020). Apabila tidak dilakukan startegi pencegahan yang tepat dalam menangani pandemi ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan yang diprediksi oleh menteri keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan tertekan mencapai level 2,5%-0%.

Perekonomian di Indonesia terganggu akibat pandemic covid-19 ini juga terjadi pada mekanisme pasar bukan berdampak hanya pada fundamental ekonomi riil saja. Terganggunya mekanisme pasar ini dapat menlenyapkan surplus ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran Terganggunya perekonomian di Indonesia, bukan pada fundamental ekonomi. Aspek vital ekonomi antara lain *supply, demand dan suppy-chain*. Apabila ketiga aspek tersebut telah terganggu maka akan terjadi krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia secara merata. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi akibat pandemic ini adalah masyarakat dengan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan harian ( *FR Yamali, Ririn Noviyanti Putri 2020*).

Mekanisme pasar yang terganggu akibat dampak covid yang menyelenyapkan surplus ekonomi, namun dampak dari covid-19 ini juga ada pengaruh positifnya terhadap perekonomian Indonesia yaitu adalah akan terbukanya peluang baru pasar ekspor selain China. Dampak positif dari pandemic ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat memperkuat perekonomian dalam negeri. Hal ini dikarenakan pandemic ini mengakibatkan pemerintah akan memprioritaskan serta memperkuat daya beli di dalam Negeri saja. Dengan hal ini, pemerintah bisa memanfaatkan dengan baik agar investasi tetap stabil walaupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini sedang terancam secara global (Hanoatubun, 2020).

Selain itu, Pemerintah diharuskan untuk mengambil kebijakan suku bungan dan diskon harga tiket penerbangan dikarenakan pergerakan nilai tukar dan harga minyak yang terkontraksi secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat tertarik untuk melakukan kunjungan wisata. Otoritas bursa ditengah kepanikan pandemic ini, terpaksa memutuskan untuk menghentikan transaksi *short selling* yang berguna untuk mengurangi tekanan yang dialami dan volatilitas yang tinggi di pasar saham tanah air (Burhanuddin, 2020).

Dampak lain dapat terlihat juga pada sektor pariwisata yaitu hotel, restoran maupun pengusaha retail. Hotel mengalami penurunan okupansi hingga 40%. Wisatawan yang sepi juga berdampak pada rumah makan atau restoran sekitar yang konsumen biasanya adalah wisatawan tersebut. Sektor pariwisata yang lemah juga berdampak pada industry retail. Daerah yang terdampak pada sektor retail antara lain yaitu Jakarta, Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Medan (Hanotubun, 2020).

Di tengah pandemik covid 19 ini, Bank Indonesia akan berusaha mempertahankan perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil ini. Perekonomian Indonesia menurun hingga 5% dengan adanya pandemic ini yang suatu saat mungkin akan mengalami penurunan lagi jika pandemic ini terus berlansung lama. Selain itu, terjadinya secara signifikan pelemahan indeks harga saham dan beberapa perusahaan BUMN mengalami kerugian pada tahun ini. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 2,5% jika pandemic covid-19 ini akan berlangsung lama. ( *FR Yamali, Ririn Noviyanti Putri 2020)*

* 1. **Bidang Sosial**

Pandemi Covid-19 merupakan bentuk bahaya (hazard) yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk social. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan). Hal inilah yang bisa kita lihat mengapa instruksi mengenai physical distancing tidak berjalan dengan efektif. Instruksi physical distancing dianggap menciptakan kerentanan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki status pekerjaan informal yang sumber pemasukan ekonominya didapat sehari - hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap (seperti pedagang dan ojek online) (Syaifuddin, 2020).

Faktor lain yang membuat instruksi physical distancing tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas bahkan cenderung mempertontonkan ego sektoral antar lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Hal ini tampak pada pemberlakuan jam malam di beberapa wilayah yang terkesan melenceng dari instruksi pemerintah pusat.

Dampak kerentanan social dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal (Tempo, 2020). Hal ini dapat dilihat pada fenomena masyarakat di beberapa wilayah saat ini. Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat merupakan kulminasi dari kerentanan sosial yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pertama, tindakan apatis. Pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk physical distancingdan tidak pulang ke kampung halamannya (mudik). Faktanya, physical distancingtidak berjalan efektif. Masih banyak masyarakat melakukan kegiatan kumpul - kumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Selain itubanyaknya masyarakat pendatang saat ini.

Tindakan pulang kampung masyarakat ini justru meningkatkan jumlah kasus Covid-19 dan sebaran wilayahnya, baik yang berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan suspectCovid-19.Secara sosiologis,tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak dapat dikatakan salah (nonetis). Sebab apa yang dilakukan masyarakat merupakan respon naluri dari kerentanan sosial yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa membuat masyarakat tetap memiliki ketahanan sosial agar tidak melakukan tindakan apatis saat bangsa dan negara ini dihadapkan pandemi Covid-19.

1. **Kajian Penelitian Sebelumnya**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan bahwa peneliti bisa melihat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga berharap dalam penelitian ini dapat memperhatikan terhadap kekurangan dan kelebihan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut studi penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk table :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Peneliti | Judul | Hasil dan Simpulan | Perbedaan |
| 1 | **Silpa Hanoatubun (2020)** | Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia | penelitian ini menunjukan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak yang terjadi pada perekonomian karena pandemic Covid-19 yang terjadi pada sat ini maka itu perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan,susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dn juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sector perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19 | Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada Populasi Sampel dan Variable penelitiannya serta skala penelitian yng lebih umum tidak pada objek spesifik tertentu dari pengaruh covid -19. |
| 2 | **Jeni Susyanti (2020)** | EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID 19 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak. Walaupun penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh antar variabel, namun data sekunder selama covid 19 menunjukkan bahwa masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang masih kebingungan dalam menerapkan peraturan perpajakan PMK no.86 / PMK.03 / 2020. | Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada Populasi Sampel dan Variable penelitiannya serta skala penlitian yng lebih umum tidak pada objek spesifik tertentu dari pengaruh covid -19. |
| 3 | Syamsuddin (2021) | DAMPAK COVID 19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA MAKASSAR | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid 19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. | Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek pajak yang diteliti karena terdapat perbedaan skala penelitian dimana ini lebih spesifik |

1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori – teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisa secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variable yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variable tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (sugiyono, 2016:61). Kerangka dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **DampakPandemi Covid 19 Terhadap TargetPenerimaan Pajak Daerah kabupaten Brebes.**

Menurut Ulber Silalahi (2011:162) target atau sasaran adalah landasan atau tolak ukur yang digunakan untuk menyusun tindakan yang akan dilakukan agar rencana yang bersifat operasional untuk mencapai tujuan dengan mudah dirumuskan. Oleh karena itu kiranya perlu memahami karakteristik yang dimiliki oleh target atau sasaran yang efektif sebagai berikut:

* + - 1. Spesifik dan dapat dimengerti (specific and understandable) Penggunaan target atau sasaran secara tidak mendua menetapkan secara jelas apa outcome yang diinginkan. Alasan utama penetapan sasaran untuk mengeliminasi ketidakpastian tentang apa yang diharapkan individu, kelompok dan organisasi yang dicapai.
      2. Dapat di ukur (measurable) Sasaran yang dapat diukur (biasanya dikuantifikasi atau dapat diekspresikan secara numerik) adalah mudah dipaham. Sasaran yang dapat diukur membantu manajer dengan satu cara untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja, menginterpretasi umpan balik dan mencapai control.
      3. Kerangka waktu tertentu (given a time frame) Sasaran yang efektif juga menunjukan adanya satu kerangka untuk waktu untuk pencapaian sasaran atau target. Jadi, lebih menyatakan kinerja akan meningkat melalui beberapa jumlah dalam periode waktu tertentu.
      4. Singkat (concise) Sasaran jangka pendek dan jangka panjang adalah lebih efektif bila singkat dan to the point.
      5. Standar (standard) Dalam banyak pekerjaan, standar adalah tingkat minimum dari kinerja yang dapat diterima oleh individu, kelompok kerja atau satu subunit dari satu organisasi. Karena itu standar secara khusus refleksi tingkat rendah dari kinerja yang ditoleransi organisasi.
      6. Realistik (ralistic) Sasaran harus realistik baik hasil yang ingin dicapai untuk mencapainya 17 disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya disesuaikan dengan waktu yang dimiliki.
      7. Fleksibel (flexible) Target atau sasaran harus dapat dimodifikasi dalam kejadian yang menguntungkan atau perubahan-perubahan ekstraordinasi dalam situasi organisasi.
      8. Dapat diterima (acceptable) Satu sasaran adalah lebih efektif bila dapat diterima orang yang bertanggung jawab mencapainya.

Dalam penelitian ini melakukan pengkajian tentang target penerimaan pajak daerah yang ada karena berdasarkan data-data yang ada, terdapat masalah yang krusial, yaitu terjadinya Pandemi corona 19.

Menurut Iskandar (2020). Wabah Corona membawa Pengaruh di semua sektor kehidupan diantaranya degan berlakunya PSBB . Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan di bidang indutri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama (Misno et al, 2020). *Social* atau *physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan

Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, antara lain :

1. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu ≥ 1,5 juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
2. Terjadinya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020.
3. Terjadinya punurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *year-on-year(yoy)* yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.
5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sector tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020.
6. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata (Hanoatubun, 2020).

Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak covid terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahan dengan persentase 77% sector formal dan 23% dari sector informal (Kemnaker, 2020).

Jika pandemik ini berlangsung lama, kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah. Akibat hal tersebut, banyak aspek-aspek lain yang terkena, antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyrakat yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim ditengah masyarakat serta pada saat yang sama juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan deficit perdagangan. (Kurniawansyah et al, 2020).

Dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia (*World Bank*, 2020). Apabila tidak dilakukan startegi pencegahan yang tepat dalam menangani pandemic ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan yang diprediksi oleh menteri keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan tertekan mencapai level 2,5%-0%.

Perekonomian di Indonesia terganggu akibat pandemic covid-19 ini juga terjadi pada mekanisme pasar bukan berdampak hanya pada fundamental ekonomi riil saja. Terganggunya mekanisme pasar ini dapat menlenyapkan surplus ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terganggunya perekonomian di Indonesia, bukan pada fundamental ekonomi. Aspek vital ekonomi antara lain *supply, demand dan suppy-chain*. Apabila ketiga aspek tersebut telah terganggu maka akan terjadi krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia secara merata. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi akibat pandemik ini adalah masyarakat dengan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan harian (Iskandar et al, 2020).

1. **Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Realisasi Pajak Daerah kabupaten Brebes**

Realisasi Pajak daerah adalah hasil akhir pendapatan pajak yang diperoleh oleh suatu daerah selama satu periode waktu tertentu yang dipungut dari wajib pajak sesuaiperaturan yang berlaku.

Realisasi Pajak Daerah (Y)

Target Pajak Daerah (X)

Pandemi Covid – 19 (H0)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

1. **Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 berdampak terhadap target penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes.
2. Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Objek Penelitian**

Tempat yang akan dipilih peneliti untuk mengadakan penelitian yaitu di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes.

1. **Variabel Penelitian**

Definisi operasional beberapa variabel penelitian sebagai yang perlu diperjelas adalah:

* + - 1. Target penerimaan pajak adalah besaran penerimaan pajak yang diperkirakan dan ditargetkan untuk diterima sampai akhir tahun. Yaitu tahun 2019 dan tahun 2020
      2. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang diterima hingga akhir tahun. Yaitu tahun 2019 dan 2020

1. **Jenis Data**

Data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder . Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dilapangan berupa data hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berisi target dan penerimaan Pajak Daerah di kabupaten Brebes tahun 2019 dan 2020.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. dokumentasi yaitu mengumpulkan data pajak daerah kabupaten Brebes tahun 2019 dan 2020 di BAPENDA kabupaten Brebes.
2. Wawancara
3. Pengamatan yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi eksisting dilapangan.
4. **Teknik Analisis Data**

Untuk menguji hipotesis penelitian yang menyatakan‘Pandemi covid-19 berdampak terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes”dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menganalisis adanya perbedaan target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebesa dengan membandingkan data target dan realisasi pajak di kabupaten Brebes antara tahun 2019 (sebelum kondisi Pandemi Covid-19) dengan tahun 2020 (setelah kondisi Pandemi Covid-19). Data pajak kabupaten Brebes meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir; Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Melakukan perbandingan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes antara antara tahun 2019 (sebelum kondisi Pandemi Covid-19) dengan tahun 2020 (setelah kondisi Pandemi Covid-19) dengan uji beda rata-rata dengan uji paired sample t test. Data pajak kabupaten Brebes meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir; Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**1. Profil Kabupaten Brebes**

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak antara 6o44’–7o21’ Lintang Selatan dan antara 108o41’–109o11’ Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Brebes dibatasi oleh:

SebelahUtara : LautJawa

SebelahTimur : KabupatenTegaldanKotaTegal

SebelahSelatan : KabupatenBanyumasdanKabupatenCilacap

SebelahBarat : KabupatenCirebondanKabupaten

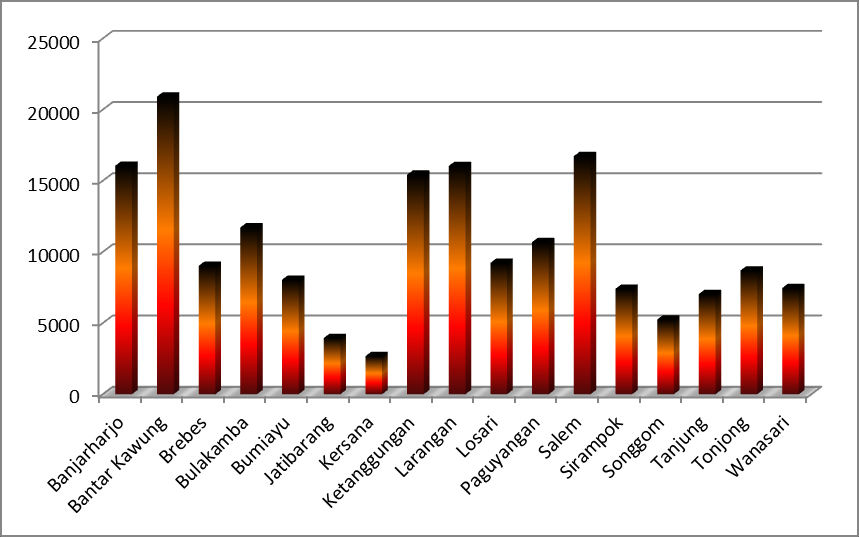
Kuningan(Propinsi Jabar).

Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 176,346,27 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.917,73 Ha atau 11,86% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.671,51 Ha atau 1,5% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan.

***Diagram4.1.***

***LuasWilayahKabupatenBrebesPerKecamatan***

***Tahun2015(dalamHa)***

******

Dengan wilayah yang begitu luas, maka penduduk kabupaten Brebes pun jumlahnya mengikuti luas wilayah yang ada, baik warga yang berdomisili di wilayah Brebes maupun warga Brebes yang merantau ke daerah lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes jumlah penduduk yang terdaftar pada sensus penduduk dapat dilihat dalam table berikut :

Table 4.2

Hasil Sensus Penduduk BPS Kabupaten Brebes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **WILAYAH** | **2016** | **2017** | **2019** |
| 1 | Salem | 59 706 | 60 116 | 60 898 |
| 2 | Bantarkawung | 89 158 | 89 322 | 89 586 |
| 3 | Bumiayu | 97 980 | 98 159 | 98 450 |
| 4 | Paguyangan | 100 454 | 101 041 | 102 151 |
| 5 | Sirampog | 63 982 | 64 292 | 64 869 |
| 6 | Tonjong | 66.437 | 66.559 | 66.756 |
| 7 | Larangan | 139.771 | 140.097 | 140.653 |
| 8 | Ketanggungan | 137.573 | 138.045 | 138.898 |
| 9 | Banjarharjo | 121.574 | 122.015 | 122.817 |
| 10 | Losari | 122.581 | 122.805 | 123.167 |
| 11 | Tanjung | 95.819 | 96.407 | 97.526 |
| 12 | Kersana | 59.027 | 59.154 | 59.363 |
| 13 | Bulakamba | 169.542 | 170.530 | 172.405 |
| 14 | Wanasari | 149. 644 | 150.996 | 153.632 |
| 15 | Songgom | 69.633 | 69.761 | 69.968 |
| 16 | Jatibarang | 85.949 | 86.365 | 87.141 |
| 17 | Brebes | 160.050 | 160.340 | 160.816 |
| Kabupaten Brebes | | 1.788.880 | 1.796.004 | 1 .809.096 |

**2. Kondisi Geologis**

Apabila ditinjau dari susunan batuan pembentuk, bentuk alam dan morfologinya, makaKabupaten Brebes termasuk di dalam bagian pegunungan Pulau Jawa. Morfologi daerah pegunungan pada Kabupaten Brebes dibedakan menjadi:

1. Daerah bukit berlereng sedang dengan batuan gamping,
2. Daerah pegunungan berlereng curam dengan batuan lava dan
3. Dataran alluvial sebagai dataran rendah berlereng datar terletak pada daerah endapan
4. Daerah Pesisir sepanjang garis pantai laut jawa antara perbatasan wilayah Jawa Barat dan wilayah Kota Tegal.
5. **Dasar Penarikan Pajak di Kabupaten Brebes**

Dengan adanya otonomi daerah maka penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) dari pusat. Dalam banyak hal, Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru daerah diberi peluang untuk mengenakan pungutan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat perluasan basis Pajak Daerah. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Diharapkan pengenaan Pajak Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Kemudian Daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Pajak daerah diatur dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya pajak daerah kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Brebes Nomor8 Tahun 2010. Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
12. **BPKAD Kabupaten Brebes**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Brebes mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   * + 1. **HASIL PENELITIAN**

Setelah melakukan observasi untuk mengumpulkan data – data pendukung baik data sekunder maupun data primer untuk mengetahui seberapa berpengaruhkah pandemi Covid -19 terhadap Target dan Realisasi pajak daerah kabupaten Brebes, maka berikut data yang telah kami peroleh pada saat kami melakukan proses wawancara dengan fihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes (BPKAD) :

Tabel 4.3

Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Brebes tahun 2019/2020

Sebelum dan setelah Pandemi Covid -19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS PAJAK DAERAH | TARGET | | REALISASI | |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Hotel; | 105,000,000 | 135,000,000 | 141,368,300 | 117,626,800 |
| 2 | Pajak Restoran; | 2,500,000,000 | 2,475,000,000 | 3,223,279,454 | 2,427,361,662 |
| 3 | Pajak Hiburan | 125,000,000 | 157,500,000 | 214,449,550 | 91,573,950 |
| 4 | Pajak Reklame | 2,000,000,000 | 2,250,000,000 | 2,411,562,251 | 2,708,916,091 |
| 5 | PP Jalan | 50,000,000,000 | 47,700,000,000 | 52,335,501,310 | 48,654,063,049 |
| 6 | Pajak MINERBA | 85,000,000 | 76,500,000 | 103,856,350 | 166,703,565 |
| 7 | Pajak Parkir; | 100,000,000 | 99,000,000 | 122,562,500 | 100,784,400 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 310,000,000 | 315,000,000 | 399,909,472 | 683,163,935 |
| 9 | PBB P2 | 35,000,000,000 | 33,300,000,000 | 36,895,117,230 | 35,081,706,997 |
| 10 | BP HTB | 13,000,000,000 | 11,700,000,000 | 16,837,446,416 | 18,581,262,232 |
| Pajak Daerah Kab | | 103,225,000,000 | 98,208,000,000 | 112,685,052,833 | 108,613,162,681 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021*

Sebagaimana disampaikan di Bab sebelunya bahwa untuk menguji hipotesis penelitian yang menyatakan‘Pandemi covid-19 berdampak terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes” dilakukan dengan beberapa analisis yang akan digunakan. Adapun analisis yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut:

* + 1. Menganalisis adanya perbedaan target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes (Comparative Analisis) dengan membandingkan data target dan realisasi pajak di kabupaten Brebes antara tahun 2019 (sebelum kondisi Pandemi Covid-19) dengan tahun 2020 (setelah kondisi Pandemi Covid-19).
    2. Dan dengan melakukan perbandingan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes antara antara tahun 2019 (sebelum kondisi Pandemi Covid-19) dengan tahun 2020 (setelah kondisi Pandemi Covid-19) dengan uji beda rata-rata dengan uji paired sample t test.
       - 1. **Comparatif analisis**
    3. **Analisis Comparative Target Penerimaan Pajak Kabupaten Brebes Sebelum dan Sesudah Pandemi (2019 dan 2020)**

Tabel 4.4

Perbandingan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Pajak | Target | | Selisih  Jumlah |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Hotel; | 105,000,000 | 135,000,000 | 30.000.000 |
| 2 | Pajak Restoran; | 2,500,000,000 | 2,475,000,000 | -25.000.000 |
| 3 | Pajak Hiburan | 125,000,000 | 157,500,000 | 32.500.000 |
| 4 | Pajak Reklame | 2,000,000,000 | 2,250,000,000 | 250.000.000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan; | 50,000,000,000 | 47,700,000,000 | -2.300.000.000 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; | 85,000,000 | 76,500,000 | -8.500.000 |
| 7 | Pajak Parkir; | 100,000,000 | 99,000,000 | -1.000.000 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 310,000,000 | 315,000,000 | 5.000.000 |
| 9 | PBB P2 | 35,000,000,000 | 33,300,000,000 | -1.700.000.000 |
| 10 | BPHTB | 13,000,000,000 | 11,700,000,000 | -1.300.000.000 |
| Jumlah | | 103,225,000,000 | 98,208,000,000 | -5.017.000.000 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes 2021 (Diolah)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa total target penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes tahun 2019 sebesar Rp 103,225,000,000dan tahun 2020 sebesar Rp 98.208.000.000.00berarti terjadi penurunan sebesar Rp 5.017.000.000 (4,86%). Jadi dampak terjadinya Pandemi Covid – 19 terhadap target pendapatan pajak daerah kabupaten Brebes adalah penurunan target sebesar 4,86%.

* + 1. **Analisis Comparative Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Brebes Sebelum dan Sesudah Pandemi (2019 dan 2020)**

Tabel 4.5

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Pajak | Realisasi | | Selisih  Jumlah |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Hotel; | 141,368,300 | 117,626,800 | -23,741,500 |
| 2 | Pajak Restoran; | 3,223,279,454 | 2,427,361,662 | -795,917,792 |
| 3 | Pajak Hiburan | 214,449,550 | 91,573,950 | -122,875,600 |
| 4 | Pajak Reklame | 2,411,562,251 | 2,708,916,091 | 297,353,840 |
| 5 | PPJ | 52,335,501,310 | 48,654,063,049 | -3,681,438,261 |
| 6 | Pajak MBLB | 103,856,350 | 166,703,565 | 62,847,215 |
| 7 | Pajak Parkir; | 122,562,500 | 100,784,400 | -21,778,100 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 399,909,472 | 683,163,935 | 283254463 |
| 9 | PBB P2 | 36,895,117,230 | 35,081,706,997 | -1,813,410,233 |
| 10 | BPHTB | 16,837,446,416 | 18,581,262,232 | 1,743,815,816 |
| Jumlah | | 112,685,052,833 | 108,613,162,681 | -4,071,890,152 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes (Diolah)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa total realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes tahun 2019 sebesar Rp 112,685,052,833dan tahun 2020 sebesar Rp 108,613,162,681berarti terjadi penurunan sebesar Rp 4,071,890,152 (3,61%). Jadi dampak terjadinya Pandemi Covid – 19 terhadap realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten Brebes adalah penurunan realisasi sebesar 3,61%

* 1. **Uji Rata – Rata dengan Uji Paired sample T test**

Paired T Test adalah uji parametrik dan dapat dipakai pada dua data yang berpasangan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata – rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Untuk dapat dilakukan pengujian ini maka yang harus dipastikan adalah datanya harus berdistribusi normal, maka perlu dilakukan uji kenormalan atau uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan proses ini kami menggunakan aplikasi SPSS. Adapun hasilnya sebagai berikut :

* + - * 1. **Uji Paired T Test Pada Target**

**Descriptives Target**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Target 2019 | 10 | Rp85,000,000 | Rp50,000,000,000 | Rp10,322,500,000 | Rp17,760,286,261 |
| Target 2020 | 10 | Rp76,500,000 | Rp47,700,000,000 | Rp9,820,800,000 | Rp16,891,598,530 |
| Valid N (listwise) | 10 |  |  |  |  |

Jumlah sampel pada Target 2019 dan Target 2020 masing-masing adalah 10 sampel.

Tabel di atas menunjukkan rata-rata (mean) Target 2019 dan Target 2020. Dimana rata-rata Target 2019 Rp10,322,500,000 > rata-rata Target 2020 yaitu Rp9,820,800,000, sehingga terjadi penurunan. Apakah perbedaan ini signifikan atukah tidak, maka akan diuji menggunakan paired t test di bawah nanti.

**Uji Normalitas**

Uji Paired T Test sebagai uji parametris memerlukan asumsi, yaitu normalitas pada selisih antara pre atau Target 2019 dan post atau Target 2020. Selisih adalah nilai post dikurangi pre.Di bawah ini adalah uji normalitas pada selisih TARGET 2019 dan TARGET 2020 menggunakan uji lilliefors**.**

**Uji Normalitas Pada Selisih (Asumsi Paired T Test)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tests of Normality** | | | | | | |
|  | Kolmogorov-Smirnova | | | Shapiro-Wilk | | |
| Statistic | Df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Selisih Target | .342 | 10 | .002 | .706 | 10 | .001 |
| a. Lilliefors Significance Correction | | | | | | |

Karena jumlah sampel 10 < 30 maka menggunakan uji normalitas Shapiro wilk

Berdasarkan uji Shapiro wilk diatas, maka nilai p value (Asymp sig 2 tailed) uji Shapiro Wilk < 0,05, p value uji Shapiro wilk pada selisih sebesar 0,001 < 0,05. Oleh karena p value uji lilliefors < 0,05, maka selisih variable tidak berdistribusi normal. Sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi pada semua uji paired t test, maka hasil uji paired t test tidak layak dan tidak valid digunakan, sehingga perlu konsekuensi menggunakan uji non parametris untuk uji beda 2 sampel berpasangan tersebut menggunakan uji Wilcoxon signed rank test.

**Wilcoxon Signed Rank Test: Uji beda 2 sampel berpasangan non parametris**

Oleh karena hasil uji normalitas tidak memenuhi syarat atau normal selisihnya, maka juga dapat diuji dengan uji Wilcoxon signed rank test seperti di bawah ini:

**NPar Tests**

**Wilcoxon Signed Ranks Test**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ranks** | | | | |
|  | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
| Target 2020 - Target 2019 | Negative Ranks | 6a | 5.83 | 35.00 |
| Positive Ranks | 4b | 5.00 | 20.00 |
| Ties | 0c |  |  |
| Total | 10 |  |  |
| a. Target 2020 < Target 2019 | | | | |
| b. Target 2020 > Target 2019 | | | | |
| c. Target 2020 = Target 2019 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Test Statisticsa** | |
|  | Target 2020 - Target 2019 |
| Z | -.764b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .445 |
| a. Wilcoxon Signed Ranks Test | |
| b. Based on positive ranks. | |

Berdasarkan Hasil uji Wilcoxon signed rank test diatas maka dapat diketahui Perbedaan Target 2019 dan Target 2020 mendapatkan nilai Z hitung -0.764 dengan p value (Asymp sig 2 tailed): 0,445>0,05 maka diterima H1 yang berarti tidak ada perbedaan bermakna atau signifikan. Perbedaan secara grafik didapatkan dari jumlah jawaban dibagi dengan total jawaban maksimal

**Paired T Test : Uji beda 2 sampel berpasangan parametris**

Di bawah ini adalah hasil uji descriptive per variable baik pre maupun post.

Rata-rata (mean) Target 2020 : 9820800000 dimana < rata-rata Target 2019 yaitu 10322500000. Apakah perbedaan ini bermakna? Maka akan dijawab dengan uji paired t test (jika asumsi normalitas terpenuhi) atau Wilcoxon signed rank test (jika asumsi normalitas tidak terpenuhi) atau tetap menggunakan PAIRED T TEST namun dilakukan BOOTSTRAPPING.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paired Samples Statistics** | | | | | |
|  | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Pair 1 | Target 2019 | 10322500000.0000 | 10 | 17760286260.51831 | 5616295647.98325 |
| Target 2020 | 9820800000.0000 | 10 | 16891598530.03853 | 5341592467.60739 |

**T-Test**

Di bawah ini adalah hasil uji paired t test:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paired Samples Test** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Paired Differences | | | | | | | | | | | t | | | df | | | Sig. (2-tailed) | |
| Mean | | Std. Deviation | | Std. Error Mean | | 95% Confidence Interval of the Difference | | | |  | | |  | | |  | |
| Lower | | Upper | |
| Pair 1 | Target 2019 - Target 2020 | 501700000.00000 | 907876068.39015 | 287095620.92717 | -147755415.28839 | | 1151155415.28839 | | 1.748 | | 9 | | | .114 | | |

Selisih perbedaan antara Target 2019 dan Target 2020 adalah 501700000 degan simpangan baku 907876068.39 dan standar error sebesar 287095620.92. Selisih tersebut dalam selang kepercayaan 95% adalah antara -147755415.28 sd 1151155415.28. Maka nilai t hitung sebesar 1.748 pada degree of freedom 9 sehingga p value sebesar 0,114 > 0,05 yang berarti hipotesis terima H0 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara Target 2019 dan Target 2020.

* + - * 1. **Paired T - Test Pada Realisasi**

Descriptive

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Realisasi 2019 | 10 | Rp103,856,350 | Rp52,335,501,310 | Rp11,268,505,283 | Rp18,650,048,356 |
| Realisasi 2020 | 10 | Rp91,573,950 | Rp48,654,063,049 | Rp10,861,316,268 | Rp17,566,643,282 |
| Valid N (listwise) | 10 |  |  |  |  |

Jumlah sampel pada Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 masing-masing adalah 10 sampel.

Tabel di atas menunjukkan rata-rata (mean) Realisasi 2019 dan Realisasi 2020. Dimana rata-rata Realisasi 2019 Rp11,268,505,283 > rata-rata Realisasi 2020 yaitu Rp10,861,316,268, sehingga terjadi penurunan. Apakah perbedaan ini signifikan atukah tidak, maka akan diuji menggunakan paired t test di bawah nanti.

Uji Paired T Test sebagai uji parametris memerlukan asumsi, yaitu normalitas pada selisih antara pre atau Realisasi 2019 dan post atau Realisasi 2020. Selisih adalah nilai post dikurangi pre.

Di bawah ini adalah uji normalitas pada selisih Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 menggunakan uji lilliefors.

Uji Normalitas Pada Selisih (Asumsi Paired T Test)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tests of Normality** | | | | | | |
|  | Kolmogorov-Smirnova | | | Shapiro-Wilk | | |
| Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Selisih Realisasi | .288 | 10 | .018 | .762 | 10 | .005 |
| a. Lilliefors Significance Correction | | | | | | |

Karena jumlah sampel 10 < 30 maka menggunakan uji normalitas Shapiro wilk

Berdasarkan uji Shapiro wilk diatas, maka nilai p value (Asymp sig 2 tailed) uji Shapiro Wilk < 0,05, p value uji Shapiro wilk pada selisih sebesar 0,005 < 0,05. Oleh karena p value uji lilliefors < 0,05, maka selisih variable tidak berdistribusi normal. Sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi pada semua uji paired t test, maka hasil uji paired t test tidak layak dan valid digunakan, Sehingga perlu konsekuensi menggunakan uji non parametris untuk uji beda 2 sampel bepasangan tsb menggunakan uji Wilcoxon signed rank test**.**

**NPar Tests**

**Wilcoxon Signed Ranks Test**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ranks** | | | | |
|  | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
| Realisasi 2020 - Realisasi 2019 | Negative Ranks | 6a | 5.50 | 33.00 |
| Positive Ranks | 4b | 5.50 | 22.00 |
| Ties | 0c |  |  |
| Total | 10 |  |  |
| a. Realisasi 2020 < Realisasi 2019 | | | | |
| b. Realisasi 2020 > Realisasi 2019 | | | | |
| c. Realisasi 2020 = Realisasi 2019 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Test Statisticsa** | |
|  | Realisasi 2020 - Realisasi 2019 |
| Z | -.561b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .575 |
| a. Wilcoxon Signed Ranks Test | |
| b. Based on positive ranks. | |

Berdasarkan Hasil uji Wilcoxon signed rank test diatas maka perbedaan Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 mendapatkan nilai Z hitung -0.561 dengan p value (Asymp sig 2 tailed): 0,575>0,05 maka terima H1 yang berarti tidak ada perbedaan bermakna atau signifikan. Perbedaan secara grafik didapatkan dari jumlah jawaban dibagi dengan total jawaban maksimal

**Paired T Test: Uji beda 2 sampel berpasangan parametris**

Di bawah ini adalah hasil uji descriptive per variable baik pre maupun post.

Rata-rata (mean) Realisasi 2019: 11268505283.3 dimana > rata-rata Realisasi 2020 yaitu 10861316268.1. Apakah perbedaan ini bermakna? Maka akan dijawab dengan uji paired t test (jika asumsi normalitas terpenuhi) atau Wilcoxon signed rank test (jika asumsi normalitas tidak terpenuhi) atau tetap menggunakan PAIRED T TEST namun dilakukan BOOTSTRAPPING.

T - Test

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paired Samples Statistics** | | | | | |
|  | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Pair 1 | Realisasi 2019 | 11268505283.3000 | 10 | 18650048356.28801 | 5897663127.81496 |
| Realisasi 2020 | 10861316268.1000 | 10 | 17566643282.05722 | 5555060361.49965 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paired Samples Test** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Paired Differences | | | | | | | | | | | t | | | df | | | Sig. (2-tailed) |
| Mean | | Std. Deviation | | Std. Error Mean | | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| Lower | | Upper | |  | | |  | | |  | |
| Pair 1 | Realisasi 2019 - Realisasi 2020 | 407189015.20000 | | 1454744447.21802 | | 460030586.66915 | | -633472471.53989 | | 1447850501.93988 | | .885 | | | 9 | | | .399 | | |

Di bawah ini adalah hasil uji paired t test :

Selisih perbedaan antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 adalah 407189015.2 degan simpangan baku 1454744447.218 dan standar error sebesar 460030586.669. Selisih tersebut dalam selang kepercayaan 95% adalah antara -633472471.53 sd 1447850501.939. Maka nilai t hitung sebesar 0.885 pada degree of freedom 9 sehingga p value sebesar 0,399 > 0,05 yang berarti hipotesis terima H0 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2020.

* + - * 1. **PEMBAHASAN**
        2. **Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Target Pajak daerah kabupaten Brebes.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan target penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes pada tahun 2020. Terjadinya penurunan target tersebut karena pemerintah   
kabupaten Brebes sudah memprediksi terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak akibat adanya covid-19. Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (phisical distancing) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan perkiraan terjadinya penurunan total pajak daerah kabupaten Brebes

Menurut penulis, Pandemi covid-19 ini berpengaruh terhadap target pajak daerahkabupaten Brebes yaitu menurunkan pendapatan pajak daerah kabupaten Brebes. Adapun jastifikasi penulis terhadap target setiap jenis pajak adalah:

* 1. Target penerimaan Pajak daerah menurun, menurut penulis adalah benar karena berkurangnya orang yang membayar pajak akibat kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Terjadi penurunan drastis pendapatan sebagian besar masyarakat,
  2. Target penerimaan Pajak daerah kabupaten Brebes, menurut penulis adalah benar menurun karena banyak pembatasan – pembatasan kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk bekerja, maka dengan tabungan yang ada, masyarakan lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya. sehingga pajaknya juga pasti turun sehingga target penerimaan pajak daerah pun turun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak covid-19 berpengaruh negatif terhadap total target pajak daerah kabupaten Brebes tahun 2020 yakni menyebabkan penurunan target pajak tahun 2020. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dalam Hanoatubun, S. (2020), Susilawati, Falefi dan Purwoko (2020) dan Santoso, Y. I. (2020). Ibrahim, A., A. (2020) dan Utomo, S. (2020) yang pada intinya menyatakan bahwa dampak covid-19 terhadap perekonomian adalah terjadinya banyak PHK, Kontraksi PMI Manufacturing, pembatasan berskala besar,sehingga target atau perkiraan penerimaan pajak menurun. Hasil penelitian ini juga mendukung pula pernyataan Direktur Jenderal Pajak Kristiadi, B. B. (2020) yang menunjukkan bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap berbagai sektor ekonomimenyebabkan penurunan objek pajak sehingga diperkirakan terjadi penurunan penerimaan. Hasil penelitian ini mendukung pula hasil penelitian Silpa Hanoatubun (2020), Burhanuddin, C. I. dan Ardi (2020), Susilawati, Falefi dan Purwoko (2020), Pitaloka, dkk. (2020) dan Feyisa, H. L. (2020) yang menunjukkan bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia. Penurunan aktivitas tersebut menyebabkan penurunan objek pajak sehingga diperkirakan terjadi penurunan penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes

Tabel 4.6

Perbandingan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Pajak | Target | | Selisih  Jumlah |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Hotel; | 105,000,000 | 135,000,000 | 30.000.000 |
| 2 | Pajak Restoran; | 2,500,000,000 | 2,475,000,000 | -25.000.000 |
| 3 | Pajak Hiburan | 125,000,000 | 157,500,000 | 32.500.000 |
| 4 | Pajak Reklame | 2,000,000,000 | 2,250,000,000 | 250.000.000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan; | 50,000,000,000 | 47,700,000,000 | -2.300.000.000 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; | 85,000,000 | 76,500,000 | -8.500.000 |
| 7 | Pajak Parkir; | 100,000,000 | 99,000,000 | -1.000.000 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 310,000,000 | 315,000,000 | 5.000.000 |
| 9 | Pajak SB Walet | - | - | - |
| 10 | **PBB P2** | 35,000,000,000 | 33,300,000,000 | -1.700.000.000 |
| 11 | **BPHTB** | 13,000,000,000 | 11,700,000,000 | -1.300.000.000 |
| Jumlah | | 103,225,000,000 | 98,208,000,000 | -5.017.000.000 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes 2021 (Diolah)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa total target penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes tahun 2019 sebesar Rp 103,225,000,000dan tahun 2020 sebesar Rp 98.208.000.000.00berarti terjadi penurunan sebesar Rp 5.017.000.000 (4,86%). Jadi dampak terjadinya Pandemi Covid – 19 terhadap target pendapatan pajak daerah kabupaten Brebes adalah penurunan target sebesar 4,86%.

* 1. **Dampak Covid-19 terhadap Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Brebes.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebagian besar realisasi pajak dari objek pajak yang ada di kabupaten Brebes sehingga menyebabkan totalrealisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes pada tahun 2020 menurun. Menurut jastifikasi penulis adalah benar.

Terjadinya penurunan tersebut akibat adanya covid-19. Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (phisical distancing) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampaisekarang. Jadi penurunan tersebut terjadimulai bulan Maret 2020. Adapun jastifikasi penulis terhadap realisasi setiap jenis pajak adalah:

* + 1. Realisasi penerimaan Pajak Daerah kabupaten Brebes menurun. Menurut penulis penurunan tersebut akibat dampak negatif dari covid-19. Covid-19 menyebabkan banyaknya sektor – sektor ekonomi yang berhenti sehingga masyarakat kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.
    2. Realisasi penerimaan Pajak daerah menurun. Menurut penulis penurunan tersebut akibat dampak negatif dari covid-19 yang menyebabkan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja akibat banyak perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawannya atau bahkan menutup usahanya karena tidak mampu lagi membiayai operasional usahanya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mempunya uang untuk membayar pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dalam Hanoatubun, S. (2020), Susilawati, Falefi dan Purwoko (2020) dan Santoso, Y. I. (2020). Ibrahim, A., A. (2020)

Tabel 4.7

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Pajak | Realisasi | | Selisih  Jumlah |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Hotel; | 141,368,300 | 117,626,800 | -23,741,500 |
| 2 | Pajak Restoran; | 3,223,279,454 | 2,427,361,662 | 795,917,792 |
| 3 | Pajak Hiburan | 214,449,550 | 91,573,950 | 122,875,600 |
| 4 | Pajak Reklame | 2,411,562,251 | 2,708,916,091 | 297,353,840 |
| 5 | PPJ | 52,335,501,310 | 48,654,063,049 | -3,681,438,261 |
| 6 | PMBLB | 103,856,350 | 166,703,565 | 62,847,215 |
| 7 | Pajak Parkir; | 122,562,500 | 100,784,400 | -21,778,100 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 399,909,472 | 683,163,935 | 283254463 |
| 9 | Pajak SBWalet | - | - | - |
| 10 | **PBB P2** | 36,895,117,230 | 35,081,706,997 | -1,813,410,233 |
| 11 | **BPHTB** | 16,837,446,416 | 18,581,262,232 | 1,743,815,816 |
| **Jumlah** | | **112,685,052,833** | **108,613,162,681** | **-4,071,890,152** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa total realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes tahun 2019 sebesar Rp 112,685,052,833dan tahun 2020 sebesar Rp 108,613,162,681berarti terjadi penurunan sebesar Rp 4,071,890,152 (3,61%). Jadi dampak terjadinya Pandemi Covid – 19 terhadap realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten Brebes adalah penurunan realisasi sebesar 3,61% .

* 1. **Analisa Hasil Penelitian untuk Perbandingan Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum Pandemi (2019) dan setelah Pandemi (21020) Dengan Uji Beda Rata – rata dengan Uji Paired Sample T - Test .**
     1. Analisa Hasil Uji Paired T – Test Target

Setelah dilakukan pengujian Paired T – Test terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS maka dapat dianalisa bahwa untuk mendapatkan kesimpulan atas pengaruh pandemic Covvid 19 terhadap Target pajak dilakukan dengan beberapa tahapan. Diawali dengan mendapatkan data mentah / primer yang di dapat dilapangan yaitu data target sebelum pandemic dan data target setelah pandemic yang kemudian dilakukan descriptive target untuk mencari rata – rata mean target sebelum dan sesudah pandemic covid – 19.

Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal.Kemudian dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan uji Shapiro wilk karena jumlah sampel kurang dari 30. Setelah dilakukan ternyata hasilnya data tidak berdistribusi normal sehingga tidak asumsi normalitas tidak terpenuhi pada semua uji paired t test sehingga perlu dilakukan uji non parametris untuk uji beda 2 sampel berpasangan menguunakan uji Wilcoxon signed rank test.

Hasil uji Wilcoxon signed rank test dapat diketahui Perbedaan Target 2019 dan Target 2020 mendapatkan nilai Z hitung -0.764 dengan p value (Asymp sig 2 tailed): 0,445>0,05 maka diterima H1 yang berarti tidak ada perbedaan bermakna atau signifikan. Sehingga dapat dilakukan pengujian dengan uji Paired T – test.

Setelah dilakukan uji paired t – test ternyata selisih perbedaan antara Target 2019 dan Target 2020 adalah 501700000 degan simpangan baku 907876068.39 dan standar error sebesar 287095620.92. Selisih tersebut dalam selang kepercayaan 95% adalah antara -147755415.28 sd 1151155415.28. Maka nilai t hitung sebesar 1.748 pada degree of freedom 9 sehingga p value sebesar 0,114 > 0,05 yang berarti hipotesis terima H0 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara Target 2019 dan Target 2020.

* + 1. Analisa Hasil Uji Paired T – Test Realisasi

Dengan menggunakan metode yang sama maka dapat dianalisa bahwa untuk mendapatkan kesimpulan atas pengaruh pandemic Covvid 19 terhadap Realisasi pajak diawali descriptive realisasi untuk mencari rata – rata mean realisasi sebelum dan sesudah pandemic covid – 19.

Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal.Kemudian dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan uji Shapiro wilk karena jumlah sampel kurang dari 30. Setelah dilakukan ternyata hasilnya data tidak berdistribusi normal sehingga tidak asumsi normalitas tidak terpenuhi pada semua uji paired t test sehingga perlu dilakukan uji non parametris untuk uji beda 2 sampel berpasangan menguunakan uji Wilcoxon signed rank test.

Berdasarkan Hasil uji Wilcoxon signed rank test diatas maka perbedaan Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 mendapatkan nilai Z hitung -0.561 dengan p value (Asymp sig 2 tailed): 0,575>0,05 maka terima H1 yang berarti tidak ada perbedaan bermakna atau signifikan. Perbedaan secara grafik didapatkan dari jumlah jawaban dibagi dengan total jawaban maksimal, Sehingga dapat dilakukan pengujian dengan uji Paired T – test.

Selisih perbedaan antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 adalah 407189015.2 degan simpangan baku 1454744447.218 dan standar error sebesar 460030586.669. Selisih tersebut dalam selang kepercayaan 95% adalah antara -633472471.53 sd 1447850501.939. Maka nilai t hitung sebesar 0.885 pada degree of freedom 9 sehingga p value sebesar 0,399 > 0,05 yang berarti hipotesis terima H0 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara Realisasi sebelum pandemikdan Realisasi setelah pandemik.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

* + - * 1. Selisih perbedaan antara Target 2019 dan Target 2020 adalah 501700000 degan simpangan baku 907876068.39 dan standar error sebesar 287095620.92. Selisih tersebut dalam selang kepercayaan 95% adalah antara -147755415.28 sd 1151155415.28. Maka nilai t hitung sebesar 1.748 pada degree of freedom 9 sehingga p value sebesar 0,114 > 0,05 yang berarti hipotesis terima H0 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara Target 2019 dan Target 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak covid-19 terhadap target pajak daerah kabupaten Brebes adalah berdampak negatif yakni menurunkan target penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes( 4, 86 %)
        2. Selisih perbedaan antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2020 adalah 407189015.2 degan simpangan baku 1454744447.218 dan standar error sebesar 460030586.669. Selisih tersebut dalam selang kepercayaan 95% adalah antara -633472471.53 sd 1447850501.939. Maka nilai t hitung sebesar 0.885 pada degree of freedom 9 sehingga p value sebesar 0,399 > 0,05 yang berarti hipotesis terima H0 atau dengan kata lain

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna atau signifikan antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2020. Sehingga dapat di artikan bahwa dampak covid-19 terhadap realisasi pajak daerah kabupaten Brebes adalah berdampak negatif yakni menurunkan realisasi penerimaan daerah kabupaten Brebes (3,61 %)

1. **SARAN**

Dari hasil penelitian dan analisa yang sudah dibahas diatas maka perlu kami sampaikan saran – saran yang mungkin dapat dipakai untuk kabupaten Brebes dalam rangka meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Brebes, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Segera menuntaskan program vaksinasi agar semua masyarakat terbebas dari penyakit yang didebabkan oleh virus corona 19 sehingga keadaan akan segera normal kembali, kegiatan – kegiatan ekonomi segera pulih sediakala.
2. Melakukan terobosan – terobosan yang untuk membuat kesadaran masyarakat kembali pulih dalam membayar pajak, seperti program penghapusan sanksi pajak dll.
3. Membuka kembali sendi – sendi ekonomi dan mengurangi pembatasan – pembatasan social ataupun fisical distancing yang selama ini telah dilakukan.
4. Menerapkan protocol kesehatan yang lebih longgar agar masyarakat dapat segera pulih dan dunia usaha hidup kembali ,
5. Memberikan bantuan baik tunai maupun non tunai untuk usaha mikro seperti pemberian kredit usaha kecil dan lain sebagainya

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustiyanti. (2020). Penerimaan pajak terancam meleset jauh dari target akibat corona. Di Katadata.co.id. Diakses, 19 Juli 2020

Burhanuddin, C. I. & Ardi. (2020). Ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran viruscorona (Covid-19). Jurnal AkMen, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020

Connolly, S., & Alistair, M. (1999). Economics of the public sector, Prentice Hall, New York

CSIS Indonesia. (2020). Mengukur dampak covid-19 pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan

indonesia 2020. Jakarta.

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan KinerjaKeuangan

Devas, N., et al. (1999). Keuangan pemerintah daerah di indonesia: UI Press, Jakarta.

Feyisa, H. L. (2020). The world economy at covid-19 quarantine: contemporary review.

International journal of economics, finance and management sciences, 8, 63-74

Hanoatubunn, S. (2020). Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. EduPsiCountJournal, 2 (2)

Ibrahim, A.A. (2020). Dampak dari pandemi covid terhadap perekonomian indonesia dankebijakan pemerintah indonesia. balewarga. Diakses 20 Juli 2020.

Iwan, T.A. (2009). Analisis pajak hotel dan restoran kabupaten klaten periode 2004-2008. Tesis,PPS, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Burhanuddin, C.I., Abdi, M.N., (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19), *Jurnal Stienobel Indonesia, 17(1): 90-98*

tirto.id. (2020). Covid-19 Tekan Perekonomian, Pendapatan Negara Diprediksi Turun 10%.

Undang – Undang Republik Indonesia (2000). *Undang – Undang no. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses dari [*http://www.djpk.kemenkeu.go.id*](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2001). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.* Diakses dari [*http://www.djpk.kemenkeu.go.id*](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Hanoatubun, S., (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia*.*Journal of Education. Diakses dari *http://www. ummaspul.e-journal.id*

J, Susyanti, J (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. Diakses dari <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1166>

Syamsuddin (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makasar **.**Journal of Business Administration (JBA), 2021 - jurnal.poliupg.ac.id

Silalahi,Dina Eva Santi. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19.*Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2.*

Soleh, Rochmansjah. *(2010)* Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.* Diakses dari [*https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3306/*](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3306/)*.*

BPS Kabupaten Brebes. (2015). Kabupaten Brebes Dalam Angka. Diakse dari https ://brebeskab.bps.go.id

Misno, A.B.P., Junediyono., Nurhadi., et al, (2020), Covid-19, Pustaka Amma Alamiah, ISBN: 978-623-92323-5-1.

Farhan Yudi. (2020). Perkembangan Corona Virus (Covid – 19) di Indonesia. PGRI Bandung

WHO. 26 March, 2020,. Critical Preparedness. Readliness and Response Actions for Covid-19.

*Paul S Myles. (2020)* Mitigating the risks of surgery during the COVID-19 pandemic. *The Lancet Journal.Diakses melalui*[*https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol396no10243/PIIS0140-6736(20)X0027-4*](https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol396no10243/PIIS0140-6736(20)X0027-4)***.***

Kemenaker. (2020). Dampak Corona Dahsyat, 13,9 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan. Diakses dari[*https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326*](https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326)

Kurniawansyah. (2020) Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. Diakses dari [*https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/117*](https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/117)

Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri. (2020)Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020, 384-388.* Diakses dariWebsite: <http://ekonomis.unbari.ac.id>.

Saefudin . (2020) Covid-19, Kerentanan Sosial, dan Gagalnya Physical Distancing. Diakses dari [*https://kolom.tempo.co/read/1326074*](https://kolom.tempo.co/read/1326074)

Ghozali. (2006 : 16) Analisis Statistic Deskriptif. Diakses dari [*http://eprints.umm.ac.id*](http://eprints.umm.ac.id)

Prakosa, (2005). Pajak dan Retribusi. *Universitas Islam Indonesia Press Yogyakarta.*

**Undang-Undang Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004*** *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.* Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id

Kristiadi, B. B. (2020). Pandemi covid-19 akan menentukan masa depan sektor perpajakan. Kontan.co.id. Diakses 19 Juli 2020

Mayasari, D. (2006). Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan aslidaerah (Analisis terhadap kabupaten dan kota di Jawa Timur). Tesis, PPS, Universitas Muhammadiyah, Malang

Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah

Priangga, M. (2009). Pengertian dasar dan ciri-ciri pajak ± definisi pajak. <http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>. Diakses, 5 Mei 2011.

Republika.co.id. (2020). Harga sarang burung walet merosot akibat wabah corona. Kamis 06 Feb 2020. Https://republika.co.id/berita/q59w1r463/harga-sarang-burung-walet-merosotakibat-wabah-corona. Diakses, 16 Juli 2020

Santoso, Y. I. (2020). Ini delapan dampak negatif bagi perekonomian indonesia akibat virus corona. Retrieved May 13, 2020, from Kontan.co.id website: <https://kontan.co.id/news/ini-delapandampak-negatif-bagi>perekonomian-indoneisa-akibat-wabah-virus-corona

Sodang, S.P. dalam buku. Jhingan, ML.1994. Ekonomi pembangunan dan perencanaan, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, PT. Grafindo Periode January.

Surabaya Net. (2020). Dampak covid19 terhadap ekonomi global. Retrieved April 18, 2020,

Fromhttps://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/dampak-covid-19-terhadap-ekonomiglobal-2020/?amp

Pitaloka, dkk. (2020). The economic impact of the Covid-19 outbreak: Evidence from Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi. 2(2).

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Utomo, S. (2020). Bos ditjen pajak ungkap 3 dampak corona terhadap ekonomi. CNN Indonesia Selasa, 14/07/2020. Diakses 19 Juli 2020

Wisanggeni, I. (2020). Mengkaji insentif pajak atas covid-19. Kontan.co.id. Diakses 19 Juli 2020